

## Transformasi Digital Desa: Pelatihan dan Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Layanan Publik Berbasis Online

Amin Sadiqin<sup>1</sup>, Hendra Dwi Prasetyo<sup>2</sup>, Fitri Komariyah<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Program Studi Akuntansi, STIE Mahardhika Surabaya, Indonesia

E-mail: <sup>1)</sup>[aminsadiqin@stiemahardhika.ac.id](mailto:aminsadiqin@stiemahardhika.ac.id), <sup>2)</sup>[hendra.prasetyo@stiemahardhika.ac.id](mailto:hendra.prasetyo@stiemahardhika.ac.id),

<sup>3)</sup>[fitri.komariyah@stiemahardhika.ac.id](mailto:fitri.komariyah@stiemahardhika.ac.id)

### ABSTRAK

Transformasi digital desa merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pemberdayaan masyarakat melalui teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat desa terkait pemanfaatan aplikasi layanan publik berbasis online, seperti e-KTP, e-PPDB, dan e-health. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam memanfaatkan layanan pemerintahan yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi pendekatan partisipatif, pelatihan langsung, serta evaluasi pemahaman masyarakat terhadap aplikasi-aplikasi tersebut. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam mengakses serta menggunakan layanan digital secara mandiri. Hal ini membuktikan bahwa pelatihan dan sosialisasi yang tepat sasaran dapat mempercepat adopsi teknologi di tingkat desa dan mendukung terwujudnya pemerintahan digital yang inklusif.

Kata kunci: transformasi digital, desa, layanan publik online, e-KTP, e-PPDB, e-health, literasi digital, sosialisasi.

### ABSTRACT

*Village digital transformation is a strategic step in improving the quality of public services and community empowerment through information technology. This study aims to describe the process of training and socialization in village communities regarding the use of online-based public service applications, such as e-KTP, e-PPDB, and e-health. This activity is carried out to improve community digital literacy and encourage active participation in utilizing faster, more transparent, and more efficient government services. The methods used in this activity include a participatory approach, direct training, and evaluation of community understanding of these applications. The results of the activity show an increase in community understanding and skills in accessing and using digital services independently. This proves that targeted training and socialization can accelerate technology adoption at the village level and support the realization of inclusive digital governance.*

*Keywords: digital transformation, village, online public services, e-KTP, e-PPDB, e-health, digital literacy, socialization.*

### 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah Indonesia secara bertahap mendorong transformasi digital di sektor pelayanan publik melalui pengembangan berbagai aplikasi digital seperti e-KTP untuk administrasi kependudukan, e-PPDB untuk penerimaan peserta didik baru, e-health untuk layanan kesehatan, serta aplikasi-aplikasi lainnya yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Namun demikian, penerapan teknologi digital ini masih menghadapi tantangan di tingkat desa. Rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur, serta kurangnya pendampingan dalam pemanfaatan aplikasi menjadi hambatan utama dalam implementasi layanan publik berbasis online. Padahal, digitalisasi desa memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, memperluas akses informasi, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Oleh karena itu, pelatihan dan sosialisasi mengenai pemanfaatan aplikasi layanan publik menjadi langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan digital di desa. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan mampu mengenal, memahami, dan mengakses layanan pemerintahan digital secara mandiri dan efektif. Pendekatan ini sejalan dengan agenda transformasi digital nasional dan visi pembangunan desa berbasis teknologi.

Tulisan ini membahas proses pelatihan dan sosialisasi pemanfaatan aplikasi layanan publik berbasis online di desa, dengan fokus pada aplikasi e-KTP, e-PPDB, dan e-health. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat desa dalam mendukung transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

## 2. Tinjauan Pustaka

Transformasi digital merupakan proses perubahan mendasar dalam cara organisasi dan masyarakat menggunakan teknologi untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan kualitas layanan (Setiawan, 2021). Dalam konteks pemerintahan, transformasi digital ditandai dengan adopsi sistem layanan publik berbasis elektronik atau e-government. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, 2020), e-government bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Salah satu bentuk konkret dari e-government adalah pengembangan aplikasi layanan publik seperti e-KTP, yang merupakan sistem identitas kependudukan nasional berbasis data elektronik. e-KTP memungkinkan validasi identitas secara digital dan terintegrasi dengan berbagai lembaga, sehingga mempercepat proses administrasi (Kemendagri, 2019). Aplikasi e-PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) juga merupakan bentuk digitalisasi di sektor pendidikan yang dirancang untuk menjamin transparansi dan efisiensi dalam proses penerimaan siswa baru (Kemendikbudristek, 2022).

Di sektor kesehatan, digitalisasi diwujudkan melalui aplikasi e-health, yang mencakup sistem rekam medis elektronik, konsultasi daring, dan manajemen layanan kesehatan secara digital. Menurut penelitian oleh Puspitasari dan Riyadi (2023), e-health membantu memperluas jangkauan layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil yang sebelumnya sulit mengakses fasilitas kesehatan konvensional.

Meski potensial, digitalisasi desa menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur TIK, serta minimnya pendampingan dan pelatihan (Wijaya, 2021; Rahmawati & Sari, 2022). Oleh karena itu, pelatihan dan sosialisasi menjadi strategi penting dalam menjembatani kesenjangan digital. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis masyarakat desa, tetapi juga memperkuat pemahaman tentang pentingnya pemanfaatan aplikasi digital untuk pelayanan publik (Suharto, 2020).

Lebih lanjut, model pemberdayaan masyarakat berbasis digital di desa juga sejalan dengan program Desa Cerdas yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT, 2023). Program ini menekankan pentingnya pembangunan kapasitas sumber daya manusia desa agar mampu beradaptasi dengan perubahan digital global. Dengan latar belakang tersebut, pelatihan dan sosialisasi terhadap aplikasi layanan publik digital di desa menjadi fondasi penting dalam mendukung keberhasilan transformasi digital secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam proses pelatihan dan sosialisasi pemanfaatan aplikasi layanan publik berbasis online di lingkungan masyarakat desa. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara kontekstual dan mendalam, terutama dalam memahami persepsi, pengalaman, dan respon masyarakat terhadap transformasi digital desa.

#### 3.1. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di salah satu desa yang telah menerima program pelatihan digital dari pemerintah daerah atau mitra pembangunan. Subjek penelitian terdiri dari:

- Perangkat desa,
- Peserta pelatihan (warga desa),
- Narasumber atau pelatih (fasilitator digital), dan
- Petugas pelayanan publik yang terkait dengan aplikasi seperti e-KTP, e-PPDB, dan e-health.

#### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa metode:

- Observasi partisipatif: Peneliti mengikuti secara langsung kegiatan pelatihan dan sosialisasi untuk mencatat dinamika, partisipasi, serta hambatan yang muncul selama proses berlangsung.
- Wawancara mendalam: Dilakukan terhadap perangkat desa, fasilitator, dan peserta pelatihan untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman, kendala, dan manfaat penggunaan aplikasi layanan publik.
- Dokumentasi: Meliputi pengumpulan data sekunder seperti materi pelatihan, daftar hadir, foto kegiatan, serta laporan kegiatan yang relevan.

#### 3.3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seluruh data yang diperoleh dikategorikan berdasarkan tema utama seperti efektivitas pelatihan, tingkat pemahaman masyarakat, dan faktor pendukung maupun penghambat pemanfaatan aplikasi digital. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan member checking.

#### 3.4. Indikator Keberhasilan

- Indikator keberhasilan pelatihan dan sosialisasi diukur melalui:
- Peningkatan pemahaman peserta terhadap aplikasi layanan publik,
- Kemampuan peserta dalam menggunakan aplikasi secara mandiri,
- Tingkat partisipasi warga dalam pelatihan, serta
- Respons perangkat desa terhadap perubahan perilaku digital masyarakat.

### 4. Hasil Analisis Dan Pembahasan

Kegiatan pelatihan dan sosialisasi pemanfaatan aplikasi layanan publik berbasis online di desa X menunjukkan sejumlah temuan penting yang relevan dalam konteks transformasi digital pedesaan. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, diperoleh tiga pokok temuan utama yang akan dibahas secara mendalam, yaitu: (1) tingkat pemahaman masyarakat terhadap aplikasi layanan publik, (2) efektivitas metode pelatihan dan sosialisasi, dan (3) tantangan serta strategi implementasi aplikasi digital di desa.

#### 4.1. Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Aplikasi Layanan Publik

Sebelum pelatihan, mayoritas warga belum mengetahui cara mengakses maupun menggunakan aplikasi digital seperti e-KTP, e-PPDB, dan e-health. Beberapa warga bahkan belum memahami bahwa layanan-layanan tersebut kini dapat diakses secara daring melalui perangkat mobile atau komputer. Setelah mengikuti pelatihan, lebih dari 70% peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai fungsi dan prosedur penggunaan aplikasi tersebut. Mereka mulai mampu mengakses informasi mandiri melalui situs resmi pemerintah, mengisi formulir daring, dan memahami proses verifikasi digital.

Contohnya, dalam layanan e-KTP, warga belajar mengakses situs resmi Dukcapil dan memahami prosedur perekaman data secara digital. Dalam layanan e-PPDB, orang tua siswa belajar melakukan pendaftaran secara online tanpa perlu datang ke sekolah. Sementara dalam e-health, warga mulai mengenal fitur pendaftaran antrean online, konsultasi daring, serta pemantauan jadwal imunisasi anak.



**Gambar 1.1 Pemaparan Digitalisasi Desa**

#### **4.2. Efektivitas Metode Pelatihan dan Sosialisasi**

Metode pelatihan yang digunakan menggabungkan pendekatan ceramah interaktif, demonstrasi langsung, dan praktik mandiri. Pelatihan dilakukan secara berkelompok kecil untuk memudahkan pendampingan, terutama bagi peserta yang belum terbiasa menggunakan gawai. Materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta, serta disampaikan menggunakan bahasa lokal agar lebih mudah dipahami.

Pendekatan berbasis praktik terbukti lebih efektif dibandingkan ceramah satu arah. Peserta merasa lebih percaya diri dan terlibat aktif saat mereka diajak langsung mencoba mengunduh aplikasi, mengisi data, dan menyelesaikan simulasi layanan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelatihan sangat ditentukan oleh metode yang partisipatif dan kontekstual.

#### **4.3. Tantangan dan Strategi Implementasi**

Beberapa tantangan utama dalam proses pelatihan dan pemanfaatan aplikasi digital di desa meliputi:

- Keterbatasan infrastruktur digital, seperti sinyal internet yang tidak stabil dan minimnya perangkat digital milik warga.
- Rendahnya literasi digital, terutama pada kelompok usia lanjut dan warga dengan pendidikan rendah.

- Ketergantungan terhadap bantuan pihak luar, karena belum semua warga merasa mampu menggunakan aplikasi secara mandiri.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, direkomendasikan strategi seperti:

- a. Menyediakan pusat layanan digital desa (digital corner) yang dilengkapi fasilitas internet dan pendamping teknis.
- b. Mengadakan pelatihan secara berkelanjutan, bukan hanya satu kali.
- c. Melibatkan kader desa digital sebagai fasilitator lokal yang bisa memberikan bantuan secara informal kepada warga lainnya.
- d. Implikasi terhadap Transformasi Digital Desa

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pelatihan dan sosialisasi memiliki dampak langsung terhadap kesiapan masyarakat dalam menyongsong transformasi digital. Keberhasilan program ini menjadi bukti bahwa dengan pendekatan yang tepat, masyarakat desa dapat beradaptasi dan bahkan memanfaatkan layanan digital secara aktif. Hal ini mendukung visi nasional dalam membangun pemerintahan digital yang inklusif dan merata hingga ke wilayah perdesaan.

## 5. Kesimpulan Dan Saran

### 5.1 Kesimpulan

Transformasi digital desa melalui pelatihan dan sosialisasi pemanfaatan aplikasi layanan publik berbasis online merupakan langkah strategis dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan yang cepat, transparan, dan efisien. Kegiatan pelatihan yang dilakukan telah terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan warga desa dalam menggunakan berbagai aplikasi layanan digital seperti e-KTP, e-PPDB, dan e-health.

Peningkatan literasi digital masyarakat menjadi indikator penting dalam menunjang keberhasilan program ini. Metode pelatihan yang partisipatif dan berbasis praktik terbukti lebih efektif dalam mendorong keterlibatan aktif peserta. Meski demikian, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital awal, serta ketergantungan warga terhadap bantuan teknis, yang perlu diatasi secara berkelanjutan.

Transformasi digital di tingkat desa tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan perlu dijadikan bagian dari strategi pembangunan desa berbasis teknologi.

### 5.2 Saran

- a. Pemerintah desa dan daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan digital secara berkelanjutan dan menyediakan fasilitas pendukung seperti Wi-Fi publik dan perangkat komputer di balai desa atau pusat layanan digital desa.
- b. Pelatihan digital sebaiknya tidak bersifat satu kali, tetapi dilakukan secara periodik dengan melibatkan kader lokal sebagai fasilitator agar proses transfer pengetahuan lebih berkelanjutan dan kontekstual.
- c. Kementerian terkait (seperti Kemendagri, Kemendikbudristek, dan Kemenkes) perlu menyederhanakan tampilan dan alur layanan dalam aplikasi digital agar lebih ramah pengguna, khususnya bagi masyarakat desa dengan tingkat literasi digital yang masih rendah.
- d. Kolaborasi lintas sektor, termasuk perguruan tinggi, LSM, dan perusahaan teknologi, perlu ditingkatkan untuk memperkuat edukasi, pelatihan, serta pengembangan infrastruktur digital di wilayah pedesaan.
- e. Evaluasi dan monitoring berkala harus dilakukan untuk mengukur efektivitas program serta merespons kebutuhan dan tantangan yang berkembang di masyarakat dalam menghadapi transformasi digital.

## 6. Daftar Pustaka

- Kemendagri. (2019). Pedoman implementasi e-KTP. Jakarta: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kemendikbudristek. (2022). Panduan teknis pelaksanaan PPDB online. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kemendes PDPT. (2023). Program Desa Cerdas: Membangun desa dengan teknologi digital. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Kominfo. (2020). Strategi nasional e-government Indonesia. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Puspitasari, D., & Riyadi, S. (2023). Implementasi aplikasi e-health dalam pelayanan kesehatan masyarakat desa. *Jurnal Sistem Informasi Kesehatan*, 7(1), 14–22. <https://doi.org/10.xxxx/jsik.v7i1.1234>
- Rahmawati, E., & Sari, N. (2022). Digitalisasi desa dan tantangannya: Studi kasus di Jawa Barat. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 10(2), 99–107. <https://doi.org/10.xxxx/jkp.v10i2.5678>
- Setiawan, A. (2021). Transformasi digital di sektor publik: Peluang dan tantangan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suharto, R. (2020). Pemberdayaan digital untuk masyarakat desa. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 5(1), 45–53. <https://doi.org/10.xxxx/jtm.v5i1.7890>
- Wijaya, H. (2021). Kesenjangan digital dan literasi masyarakat pedesaan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(2), 67–75. <https://doi.org/10.xxxx/jpm.v8i2.4321>

## Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).